

Yayasan Kemanusiaan Gaza – Roda dalam Mesin Genosida Israel

Kebijakan Israel di Gaza – khususnya pengoperasian titik distribusi bantuan Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) dan larangan akses laut pada 12 Juli 2025 – merupakan serangan sistematis terhadap warga sipil Palestina dan menuntut kecaman tegas tanpa syarat. Tindakan-tindakan ini melanggar prinsip-prinsip inti hukum kemanusiaan internasional (IHL), mempersenjatai bantuan kemanusiaan, dan memaksa warga Palestina yang putus asa untuk bermain rolet Rusia yang mematikan di situs-situs GHF. Larangan akses laut, yang diberlakukan di tengah musim panas dengan kondisi yang tidak layak huni, merampas makanan, bantuan, dan martabat dari warga sipil, mendorong mereka menuju titik-titik bantuan yang mematikan di mana mereka menghadapi risiko kematian atau mutilasi. Efek kumulatif dari kebijakan-kebijakan ini, bersama dengan pernyataan eksplisit dari pejabat Israel, mengungkapkan tidak hanya niat tetapi juga strategi terkoordinasi yang memenuhi definisi hukum genosida.

Pelanggaran Israel terhadap Hukum Internasional

Perilaku Israel di Gaza secara terang-terangan melanggar hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional yang dikodifikasi dalam Konvensi Jenewa, hukum adat internasional, dan traktat multilateral:

1. Pelanggaran Prinsip Pembedaan

Dengan menempatkan titik distribusi bantuan GHF di dalam atau dekat zona evakuasi militer – seperti pos pemeriksaan Netsarim dan bagian-bagian Rafah – Israel mengabaikan prinsip dasar pembedaan antara warga sipil dan kombatan, yang diatur dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa. Kantor Hak Asasi Manusia PBB melaporkan 798 kematian di dekat titik bantuan sejak akhir Mei 2025, dengan setidaknya 615 kematian terkait langsung dengan situs GHF (Reuters, 11 Juli 2025). Personel IDF secara rutin menembaki kerumunan ini, mengkonfirmasi bahaya yang disengaja terhadap warga sipil.

2. Hukuman Kolektif

Pemblokiran Gaza, yang diperketat sejak Oktober 2023 dan diperkuat oleh larangan akses laut pada 12 Juli 2025, melanggar Pasal 33 Konvensi Jenewa Keempat, yang melarang hukuman kolektif. Penangkapan ikan telah menjadi sumber makanan penting di Gaza selama beberapa generasi. Dengan melarang tidak hanya penangkapan ikan tetapi juga berenang di tengah panas musim panas yang brutal – di tengah rumah-rumah yang hancur, kelangkaan air, dan tanpa listrik – Israel menimbulkan penderitaan pada penduduk, melanggar kewajibannya sebagai kekuatan pendudukan.

3. Perampasan Nyawa secara Sewenang-wenang

Larangan akses laut, yang ditegakkan dengan perintah tembak di tempat untuk perenang dan nelayan, merupakan pelanggaran jelas terhadap Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang menjamin hak untuk hidup. Dikombinasikan dengan penembakan IDF di situs bantuan GHF, tindakan-tindakan ini menunjukkan pola eksekusi sewenang-wenang yang setara dengan kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Statuta Roma.

4. Persenjataan Bantuan Kemanusiaan

GHF, yang dibentuk di bawah inisiatif bersama AS-Israel pada awal 2025 dan dioperasikan dengan keamanan IDF serta kontraktor swasta AS, merusak prinsip kemanusiaan netralitas, ketidakberpihakan, dan independensi. Pernyataan Amnesty International pada 29 Mei 2025 mengutuk GHF sebagai “tidak sah dan tidak manusiawi,” mencatat bahwa itu melanggar kewajiban Israel untuk memastikan kesejahteraan penduduk yang diduduki. Alih-alih memberikan akses aman ke bantuan, GHF mengekspos warga sipil terhadap kekerasan mematikan, mengubah bantuan kemanusiaan menjadi alat perang.

Tindakan-tindakan ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk “menciptakan kondisi kehidupan yang dirancang untuk membawa kehancuran fisik *suatukelompok*,” dalam pelanggaran langsung terhadap Pasal II(c) Konvensi Genosida 1948.

Niat Genosida: Kata-kata di Balik Perang

Ambang batas hukum untuk genosida mencakup persyaratan niat spesifik. Pemimpin politik dan militer Israel telah berulang kali menyebutkan niat ini dalam istilah yang tidak ambigu. Menteri Pertahanan Yoav Gallant menggambarkan warga Palestina sebagai “hewan manusia,” sementara Menteri Warisan Amichai Eliyahu mengusulkan untuk menjatuhkan bom atom di Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengutip perintah Alkitab untuk “mengingat Amalek,” sebuah panggilan yang secara historis ditafsirkan sebagai mandat untuk pemusnahan total.

Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyatakan, “Satu butir gandum pun tidak boleh sampai ke Gaza,” dan Presiden Isaac Herzog menyangkal adanya warga sipil yang tidak bersalah, menegaskan kesalahan kolektif. Menteri Pendidikan Yoav Kisch dengan blak-blakan berkata: “Mereka harus dimusnahkan.” Pernyataan dari jenderal IDF dan anggota Knesset menggemakan retorika genosida ini, dengan satu wakil ketua parlemen menyerukan untuk “menghapus Gaza dari muka bumi,” dan yang lain mendesak untuk “meratakan Gaza tanpa belas kasihan.”

Pernyataan-pernyataan ini bukanlah penyimpangan – mereka mencerminkan kebijakan negara. Tahun demi tahun, Pawai Bendera Yerusalem bergema dengan seruan “Maut untuk Arab,” menegaskan budaya eliminasi di inti negara Israel. Perpaduan antara bahasa yang merendahkan kemanusiaan dengan kebijakan yang secara sistematis menghancurkan kehidupan sipil mengungkapkan niat genosida di balik tindakan Israel di Gaza.

Hari-hari Paling Berdarah di Titik Distribusi Bantuan GHF

Titik-titik distribusi Yayasan Kemanusiaan Gaza telah menjadi ladang pembantaian. Beberapa hari paling berdarah sejak akhir Mei 2025 meliputi:

- **3 Juni 2025:** 102 tewas, 490 terluka
- **6 Juni 2025:** 110 tewas, 583 terluka
- **8 Juni 2025:** 125 tewas, 736 terluka
- **10 Juni 2025:** 163 tewas, 1.495 terluka
- **11 Juni 2025:** 223 tewas, 1.858 terluka
- **12 Juni 2025:** 245 tewas, 2.152 terluka

Insiden-insiden ini, yang dikonfirmasi oleh jurnalis dan staf medis, menunjukkan pola berulang dari tembakan yang ditargetkan terhadap warga sipil yang berkumpul untuk menerima bantuan. Peningkatan jumlah kematian adalah hasil langsung dari militerisasi ruang kemanusiaan yang disengaja.

Runtuhnya Sistem Kesehatan Gaza: Rumah Sakit Diserang, Obat-obatan Diblokir

Saat warga sipil dimutilasi di situs GHF dan di seluruh Gaza, mereka tidak menemukan perlindungan di rumah sakit – karena Israel telah membom dan merusak **setiap rumah sakit**. Infrastruktur kesehatan Gaza telah menjadi sasaran sistematis, mengurangi ruang operasi menjadi puing, menghancurkan unit perawatan intensif, dan membunuh dokter, perawat, dan pasien. Organisasi Kesehatan Dunia telah mengutuk serangan-serangan ini sebagai kejahatan perang.

Akibat blokade, obat-obatan penting, termasuk anestesi, pereda nyeri, dan antibiotik, tidak tersedia. Dokter sering kali terpaksa melakukan amputasi, operasi caesar, dan pembedahan penyelamat jiwa **tanpa sedatif atau anestesi**. Kekejaman ini bukanlah kerusakan kolateral – ini adalah bagian dari desain. Melukai warga sipil di titik bantuan dan kemudian menolak perawatan bagi mereka melayani tujuan genosida yang lebih luas dari Israel untuk menghilangkan populasi Gaza dengan segala cara.

Prajurit Diperintahkan untuk Menembak Warga Sipil: Pelanggaran Hukum dan Hati Nurani

Dalam pengungkapan yang memberatkan yang diterbitkan oleh *Haaretz* pada 27 Juni 2025, beberapa prajurit Israel bersaksi bahwa mereka secara eksplisit diperintahkan untuk menembak warga Palestina tak bersenjata yang berkumpul di situs distribusi bantuan GHF. Kesaksian ini mengkonfirmasi apa yang telah lama dilaporkan oleh para penyintas dan jurnalis: warga sipil yang antre secara damai untuk makanan dan air sengaja dijadikan sasaran, bukan secara tidak sengaja terjebak dalam baku tembak. Seorang perwira menggambarkan pemandangan itu sebagai “ladang pembantaian” dan mengakui bahwa peluru tajam digunakan bukan untuk membela diri, melainkan untuk

membubarkan kerumunan dengan kekerasan. Kebijakan pembunuhan yang terhitung ini melanggar hukum internasional dan etika militer.

Pengadilan Nuremberg, yang mengikuti kekejaman Perang Dunia II, menetapkan preseden bahwa “hanya mengikuti perintah” bukanlah pembelaan untuk kejahatan perang. Prajurit secara pribadi bertanggung jawab atas perilaku yang melanggar hukum, terutama ketika perintah jelas-jelas ilegal. Prinsip ini tertanam dalam Kode Etik IDF sendiri, yang menegaskan bahwa prajurit Israel tidak hanya memiliki **hak**, tetapi juga **kewajiban** untuk menolak perintah ilegal. Menembakkan peluru tajam ke warga sipil tak bersenjata – terutama mereka yang mencari bantuan kemanusiaan – bukanlah area abu-abu: itu adalah kejahatan perang. Prajurit yang mengikuti perintah ini, komandan yang mengeluarkannya, dan negara yang memungkinkan kebijakan ini harus dimintai pertanggungjawaban. Tanggung jawab moral tidak dapat dialihkan. Juga tidak dapat dikubur di bawah puing-puing rakyat yang ditolak makanan, air, dan martabat.

Kisah Seorang Korban: Ditembak Saat Kelaparan

Saya ingin berbagi cerita pribadi tentang seorang teman dekat, seorang penduduk Gaza berusia 20 tahun. Ia kehilangan seluruh keluarganya dalam serangan udara Israel pada tahun 2024. Sejak itu, ia hidup sendirian di tengah reruntuhan, mencari makanan, berjalan dalam keadaan trauma. Pada awal Juli 2025, ia telah menjalani empat hari penuh tanpa makan. Tangannya gemetar karena lapar; penglihatannya kabur; napasnya tersengal di bawah panas musim panas yang menyengat. Kelaparan mencabik-cabik tubuhnya. Ia tidak punya pilihan. Ia berjalan – lebih tepatnya tersandung – menuju situs bantuan GHF di Netsarim. Itu adalah harapan terakhirnya.

Saat tiba, ia mendapati dirinya dikelilingi oleh ribuan orang lain, sama-sama putus asa. Tiba-tiba, tanpa peringatan, pasukan Israel membuka tembakan. Peluru merobek kerumunan. Ia tertembak sekali di lengan, lagi di punggung. Peluru ketiga menembus pahanya. Peluru keempat menghancurkan sebagian tulang belakangnya. Ia roboh ke pasir, lumpuh, berdarah, dikelilingi oleh jeritan. Tidak ada ambulans. Tidak ada tandu. Tidak ada medis. Hanya keberanian mentah dari orang-orang asing – warga Palestina lain yang menolak meninggalkannya. Mereka menggendongnya dengan berjalan kaki di bawah ancaman terus-menerus untuk kembali menjadi sasaran ke rumah sakit fungsional terdekat. Ia kehilangan satu jari. Ia mungkin tidak akan pernah berjalan lagi. Tapi ia selamat. Dan untuk apa? Untuk mencoba makan.

Larangan Akses Laut Memaksa Ketergantungan pada GHF

Larangan akses laut pada 12 Juli 2025 menghilangkan sumber makanan independen terakhir Gaza. Dengan mengkriminalisasi penangkapan ikan dan berenang di bawah ancaman kematian, Israel mencabut otonomi warga Palestina dan mendorong mereka menuju satu-satunya pilihan yang tersisa: situs GHF. Dokter Tanpa Batas melaporkan bahwa larangan tersebut, yang ditegakkan selama musim panas yang tak tertahankan dengan sedikit naungan atau air, telah memperburuk dehidrasi, malnutrisi, dan

keputusasaan (MSF, Juli 2025). Kebijakan ini menyalurkan warga Palestina ke perangkap bantuan yang mematikan – menolak alternatif penyelamat jiwa sambil membangun zona kematian.

GHF sebagai Roda dalam Mesin Genosida Israel

Yayasan Kemanusiaan Gaza bukanlah penyedia bantuan yang netral – ini adalah roda dalam mesin genosida. Strukturnya memastikan bahwa warga sipil terpapar pada bahaya maksimal dengan dalih bantuan. Larangan akses laut, militerisasi bantuan, dan penargetan sistematis situs distribusi bergabung menjadi strategi yang koheren: untuk menghancurkan populasi sipil Gaza secara keseluruhan atau sebagian.

Jumlah kematian PBB sebanyak 798 di situs bantuan, yang bertambah setiap hari, diiringi oleh puluhan ribu lainnya yang terluka, trauma, dan terlantar. Operasi GHF – yang dilakukan dengan pengawasan IDF dan dukungan AS – menjadikannya bersalah dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Iniwarung ini memungkinkan genosida yang terselubung dalam bahasa kemanusiaan.

Kesimpulan

Tindakan Israel di Gaza – melalui GHF, larangan akses laut, blokade total, dan penghancuran sistematis sistem kesehatan Gaza – tidak hanya tercela secara moral tetapi juga tidak dapat dibela secara hukum. Kebijakan-kebijakan ini melanggar hukum internasional, norma kemanusiaan, dan prinsip-prinsip dasar martabat manusia. Yayasan Kemanusiaan Gaza, alih-alih memberikan bantuan, berfungsi sebagai mekanisme pemusnahan. Larangan akses laut pada 12 Juli memaksa warga sipil untuk memilih antara kelaparan atau kematian yang hampir pasti di situs bantuan yang dimiliterisasi. Penghancuran rumah sakit dan penahanan obat-obatan memperparah penderitaan.

Dunia harus bertindak. GHF harus dibubarkan. Larangan akses laut harus dicabut. Rumah sakit Gaza harus dibangun kembali dan dipasok kembali. Dan Israel harus dimintai pertanggungjawaban atas kampanye genosidanya. Tidak kurang dari kelangsungan hidup suatu bangsa – dan kredibilitas hukum internasional – yang dipertaruhkan.